

**IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN
TERHADAP PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DI
WILAYAH KOTA DENPASAR**

Oleh :

I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha, Nim. 2014101133

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan peredaran produk kosmetik krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya di kota Denpasar, (2) Upaya BPOM untuk melindungi konsumen dari peredaran kosmetik krim pemutih wajah yang tidak memenuhi syarat di kota Denpasar. Teknik yang digunakan dalam penentuan sample adalah teknik *non probabilitas sampling* dengan cara *Porpositive Sampling*. Untuk teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap beredarnya produk kosmetik yang berbahaya dan merugikan konsumen yaitu dengan melakukan pembinaan pengawasan yang dilakukan secara rutin, serta melakukan sanksi tegas apabila pelaku usaha melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah yaitu dengan menyita barang produk. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah terkait peredaran produk kosmetik berbahaya yaitu dengan memberi edukasi, sosialisasi, dan juga melakukan pengawasan Pre-Market yang dimana mencakup evaluasi dan pengujian produk dan Post-Market yang dimana mencakup inspeksi rutin dan pengujian produk yang sudah beredar serta peringatan dan dari pihak instansi terkait secara umum sanksi administratif yang berupa pencabutan izin edar dan memberikan surat peringatan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Kosmetik

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 LETTER a OF LAW NO. 8 OF 1999
CONCERNING CONSUMER PROTECTION RELATED TO CONSUMER
LOSSES RELATING TO FACIAL WHITENING CREAM COSMETIC
PRODUCTS IN THE CITY OF DENPASAR**

By :

I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha, Nim. 2014101133

Law and Citizenship Department

Ganesha University of Education

ABSTRACT

This study aims to determine (1) Legal protection for consumers related to the circulation of facial whitening cream cosmetic products containing hazardous materials in the city of Denpasar, (2) BPOM's efforts to protect consumers from the circulation of facial whitening cream cosmetics that do not meet the requirements in the city of Denpasar. The technique used in determining the sample is a non-probability sampling technique by means of Purposive Sampling. For data processing and analysis techniques using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that the form of legal protection against the circulation of cosmetic products that are dangerous and detrimental to consumers is by conducting routine supervision guidance, as well as imposing strict sanctions if business actors violate the rules that have been made by the government, namely by confiscating product goods. The efforts made by the government related to the circulation of hazardous cosmetic products are by providing education, socialization, and also conducting Pre-Market supervision which includes product evaluation and testing and Post-Market which includes routine inspections and testing of products that are already in circulation as well as warnings and from related agencies in general administrative sanctions in the form of revocation of distribution permits and issuing warning letters.

Keywords: *Keywords: Legal Protection, Consumers, Business Actors, Cosmetics*